

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja,2004:2). Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang syarat dengan politik, demokratis, dan pembangunan menjadikan salah satu gambaran dari bentuk otonomi desa serta demokrasi desa.

Pengaturan mengenai Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama sehingga dapat terlaksana dalam mengawasi pembangunan, pengelolaan dana desa dan kendala-kendala antara kerjasama BPD dengan pemerintah desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan musyawarah desa atau yang lebih kenal sebutan Musdes yang dapat di selenggarakan untuk meyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokrasi, transparan, akuntabel dan dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

kemampuan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan potensi dan kekuatan untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintah desa, Namun Badan Permusyawaratan Desa Haumeni Ana lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang kurang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pembangunan di desa yang belum terlaksana, tidak melaksanakan penyusunan peraturan desa dan belum menghasilkan rancangan peraturan desa di Desa Haumeni Ana.

Berikut ini data pendidikan BPD terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Jabatan dan Kedudukan Anggota BPD di Desa Haumeni Ana**

No	Nama-Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Melkianus Tnopo	Ketua	SMA
2	Yasintus Abi	Wakil	SMA
3	Ernika Theresia Lake	Sekretaris	SMA
4	Romandus Asuat	Anggota	SMA
5	Kamelus Nino	Anggota	SMA
6	Oktovianus Suni	Anggota	SMA
7	Yohanes Berkanis	Anggota	SMP

*Sumber: Profil Desa Haumeni Ana Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari tingkat pendidikan semua anggota BPD di Desa Haumeni Ana ini sesuai dengan syarat minimal anggota BPD, akan tetapi kurangnya kerja sama sehingga Pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang mengakibatkan rencana kegiatan belum terlaksana seperti: Peningkatan jalan usaha tani, Sumur bor dan instalasi jaringan perpipaan, Pembangunan pasar desa, Pembangunan WC sehat, dan Pembangunan embung desa. Lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil perencanaan pembangunan yang belum terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan khususnya dalam pembangunan fisik sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, *Pertama* Rendahnya kemampuan BPD dalam mengelola pembangunan terhadap pembangunan yang dilaksanakan, *kedua* Minimnya pengawasan kinerja pemerintah desa oleh BPD, dan *ketiga* Pengajuan anggaran terlambat.

Beberapa faktor yang telah diuraikan diatas mengindikasikan kurangnya kerja sama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa, Belum maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan Penundaan Dalam Merealisisi Penganggaran Pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HAUMENI ANA KECAMATAN BIKOMI NILULAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yakni manfaat Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca dan memberika informasi mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman penelitian terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pikiran yang dapat memperluas wawasan masyarakat tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan.